

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Skor capaian untuk variabel Pengelolaan dana desa adalah sebesar 92,2% dengan kategori sangat baik. Hal ini menggambarkan bahwa aparat desa di Kantor Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo mampu untuk melakukan pengelolaan dana desa dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah dalam hal pengelolaan dana desa. Dengan pengelolaan dana desa yang baik maka sasaran pembangunan desa akan lebih terarah dan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Baiknya pengelolaan tersebut tentunya tidak lepas dari adanya peran pendamping desa pula yang merupakan tenaga bantuan dari dinas kementerian desa yang benar-benar kompeten membantu aparat desa di Kantor Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
2. Skor capaian untuk variabel Kualitas pelaporan keuangan desa adalah sebesar 90,1% dengan kategori sangat baik. Hal ini menggambarkan bahwa laporan keuangan dana desa di Kantor Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo telah memenuhi unsur-unsur penting secara kualitatif dalam laporan keuangan dimana laporan keuangannya telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

terutama dalam pemerintahan desa. Dengan baiknya kualitas pelaporan keuangan maka akan menjadi sebuah prestasi bagi desa yang tentunya bermanfaat bagi segenap aparat yang ada di Kantor Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari Pengelolaan dana desa di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo terhadap Kualitas pelaporan keuangan di Kantor Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. besarnya koefisien determinasi atau angka *R Square* adalah sebesar 0,436. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 43,6% variabilitas Kualitas pelaporan keuangan desa pada Kantor Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dapat dijelaskan oleh Pengelolaan dana desa, sedangkan sisanya sebesar 56,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut seperti komitmen organisasi, sistem pengendalian intern, pengawasan, kompetensi aparat desa, tingkat pendidikan, akuntabilitas pengelolaan serta transparansi dalam pengelolaan dana desa.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa Lamu Kecamatan Tilamuta agar lebih meningkatkan lagi pelatihan dan pendidikan serta kerja sama dalam mengelola keuangan Desa.

2. Pemerintah disarankan agar dapat meningkatkan pemahaman setiap aparat Desa mengenai akuntansi, guna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti faktor lain terkait dengan kualitas pelaporan dana desa, karena nilai koefisien determinasi hanya sebesar 43,6%. Kemudian dapat pula dengan merekonstruksi penilaian instrumen penelitian dengan penggunaan skala *Guttman* agar hasil jawaban kusioner menjadi objektif ataupun dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner ketika menguji pengendalian piutang. Serta dapat pula dengan melakukan perbandingan kualitas pengelolaan dana desa antara desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintah*. Akademia. Jakarta.
- Chabib, Sholeh dan Heru Rachmansyah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah* . Fokus media. Jakarta.
- Charoline Ovita, husaini, dan Abdullah. 2013. Pengaruh implementasi pengelolaan keuangan dan pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan komisi pemilihan umum. *Jurnal fairness* volume 3, Nomor 3, 2013: 82-94 ISSN 2303-0348
- Fontanella, Amy. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna dalam Memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Tesis, Universitas Andalas, Padang.
- Ghojali Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS edisi ketiga*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim Abdul, Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Unit penerbit dan percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. YPKN.\
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit ERLANGGA
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Khlimiah Isniatul, Handayani Nur, 2016. Penyajian laporan keuangan pemerintah desa (studi empiris di desa Ampeledento kabupaten malang) *jurnal ilmu dan riset akuntansi* volume 5, No 12 Desember 2016: ISSN 2460-0585

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit STIEY PKN. Yogyakarta.

Mosii, Sjafrudin. 2015. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa*. Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. PT. Refika Adimata. Bandung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah No 43/ 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Pasal 93 dan 94 No 43 Tahun 2014 mengatur Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi dana Desa.

Rahayu, Sri. 2005. *SPSS Versi 12.00 dalam Riset Pemasaran*. CV.Alfabeta. Bandung.

Standar Akuntansi Pemerintah. 2010. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010. Fokusmendua. Bandung.

Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT alex media Komputindo

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Umami Risya, idang Nourdin, 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (studi empiris di desa jagamukti kecamatan surade. *Jurnal ilmiah volume 6 edisi 11, 2017: ISSN 20886969*

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 12 tentang Pemerintah Daerah.